

PERUBAHAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN
MAKALAH
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
Sosiologi dan Antropologi Pendidikan
yang dibina oleh Bapak Drs Santoso Yuwono, S.Pd

Oleh Offering F4
Kelompok 7

1. Diah Retno Palupi (140151602993)
2. Gayut Fatwa Zatdni (140151602825)



UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
Februari 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan sehingga penulisan makalah ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti dari awal hingga akhir penyelesaian.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Drs. Santoso Yuwono, S.Pd yang telah memberikan berbagai dukungan dan materi sebagai bahan dalam penulisan makalah ini. Tanpa bantuan beliau kami tidak mungkin bisa memaparkan materi dengan baik. Dan tak lupa kami ucapkan terimakasih untuk teman-teman terutama offering F4 yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan makalah ini.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah “Sosiologi dan Antropologi Pendidikan”. Selain itu adalah untuk menambah wawasan tentang “Perubahan Sosial dan Pendidikan” bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Makalah ini masih banyak kekurangan. Untuk itu dibutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Akhirnya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Blitar, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Pendidikan.....	3
2.2. Perubahan Sosial.....	8
2.3. Hubungan Perubahan Sosial dan Pendidikan	23
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan.....	34
3.2 Saran.....	35
DAFTAR RUJUKAN.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan ada dan hidup di dalam masyarakat, maka keduanya memiliki hubungan ketergantungan yang erat. Pendidikan mengabdikan kepada masyarakat dan masyarakat menjadi semakin berkembang dan maju melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat. Maka lembaga-lembaga pendidikan harus memahami perannya tidak sekadar menjual jasa tetapi memiliki tugas mendasar memformat Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Masyarakat ternyata tidak statis, tetapi dinamis, bahkan sangat dinamis. Pada masa sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat pesat. Isu postmodernisasi dan globalisasi sebenarnya ingin merangkum pemahaman suatu perubahan yang sangat cepat dan dahsyat. Modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dan kebudayaannya dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju modern. Globalisasi pada hakikatnya merupakan suatu kondisi meluasnya budaya yang seragam bagi seluruh masyarakat di dunia. Globalisasi muncul sebagai akibat adanya arus informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Sebagai akibatnya, masyarakat dunia menjadi satu lingkungan yang seolah-olah saling berdekatan dan menjadi satu sistem pergaulan dan budaya yang sama.

Senge (1990) dalam Maliki (2010:276), perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan, karena ia melekat, lahir dalam proses pengembangan masyarakat. Kebutuhan untuk bisa survive dalam ketidakpastian dan perubahan menjadi tuntutan masa kini. Perubahan terjadi begitu cepat dan luas, termasuk

mengubah dasar-dasar asumsi dan paradigma memandang perubahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat juga dialami dunia pendidikan.

Sosiologi pendidikan memainkan perannya untuk ikut memformat pendidikan yang mampu berkiprah secara kontekstual. Sistem, muatan, proses dan arah pendidikan perlu ditata ulang dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di arena perubahan sosial tersebut.

1.2.Rumusan Malah

1. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan?
2. Apa sajakah macam-majam jenis pendidikan di Indonesia?
3. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial?
4. Apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan sosial?
5. Apa saja aspek yang dapat menjadi perubahan sosial?

1.3.Tujuan

1. Menjelaskan pengertian pendidikan.
2. Menjelaskan macam-majam jenis pendidikan di Indonesia.
3. Menjelaskan pengertian perubahan sosial.
4. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.
5. Menjelaskan aspek yang dapat menjadi perubahan sosial.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu cara untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang ditujukan oleh individu untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupannya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 dalam Purnamasari, Wulan:Online, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Menurut Mundzir, 36:2013, pendidikan didefinisikan oleh siapapun menurut aliran manapun dapat dianalisis berdasarkan suatu sistem. Analisis terhadap sistem pendidikan dapat dilakukan dari *in put*, proses, *out put*, dan *out come* dimana keseluruhannya saling memengaruhi dan menentukan perubahan sosial yang akan terjadi.

a. Pendidikan sebagai Suatu Sistem

Menurut Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

b. Pendidikan Formal

Pendidikan formal lebih dikenal sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga sekolah, baik yang dikelola oleh

pemerintah maupun swasta, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan formal memiliki peraturan yang tegas dan mengikat, serta kurikulum yang jelas.

Tiap-tiap jenjang pada pendidikan formal sangat berkaitan, karena siswa tidak dapat melanjutkan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi apabila tidak menempuh jenjang yang lebih rendah sebelumnya. Misalnya seseorang ingin bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka dia harus bersekolah di Sekolah Dasar terlebih dahulu. Hal ini menjadi salah satu syarat mutlak diantara berbagai syarat lainnya bagi siswa untuk dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dalam penyelenggaraan sistem pendidikan formal.

c. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah, atau yang berada di lingkungan masyarakat, seperti kursus, lembaga bimbingan belajar, dan balai latihan kerja. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (12) dalam Mundzir, 2013 menjelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pengganti, adalah apabila seseorang tidak mampu menempuh pendidikan formal, maka dia dapat

menempuh pendidikan nonformal demi kelangsungan hidupnya.

Penambah, adalah apabila seseorang yang telah menempuh pendidikan formal dan ingin menambah ilmunya melalui pendidikan nonformal adalah tidak dilarang, sedangkan pelengkap berarti pendidikan sepanjang hayat berlaku bagi setiap orang untuk selalu melengkapi pendidikannya baik formal maupun nonformal.

Seseorang dapat mengambil program pendidikan nonformal dalam bentuk sajian paket A (setara dengan pendidikan SD), B (setara dengan pendidikan SLTP), dan C (setara dengan SMA/SMK). (Pasal 26:4 Sisdiknas, dalam Mundzir 2013)

d. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, seperti yang dijelaskan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (13) dalam Mundzir, 2013 bahwa Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan menurut Coombs, 1973 dalam Mundzir, 2013, pendidikan informal dikatakan sebagai suatu proses sepanjang hayat bagi individu yang terkait dengan masalah pengetahuan, sikap, nilai, dan ketrampilan yang diperoleh dalam pengalaman hidup sehari-hari yang bersumber dari lingkungan, baik dari keluarga atau tetangga, empat bekerja, teman bermain, pasar, perpustakaan maupun dari media masa.

Menurut Mundzir 40:2013,

“Tujuan Pendidikan Informal tidak secara eksplisit ditunjukkan kepada warga belajar namun tersirat bahwa tujuan belajar memang dicanangkan secara komprehensif pada saat unit keluarga ingin membentuk norma keluarga. Isi pendidikan informal memiliki acuan normatif yang dikembangkan dari falsafah hidup keluarga yang berisi pola budaya dan nilai hidup, serta ketrampilan praktis untuk bekal dewasa yang ingin disampaikan pada penerusnya.”

Selain itu, Mundzir 40:2013 juga menambahkan bahwa,

“Waktu penyelenggaraan pendidikan informal sangat fleksibel dan tidak terikat dan terbatas waktu. Prosesnya berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan informal tidak memiliki sistem, karena komponen sistem tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk komponen sistem. Sedangkan dalam pengawasannya, pendidikan informal tidak memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan. Pengawasan pendidikan dalam keluarga sangat bergantung pada keketatan dan kedisiplinan dalam keluarga tersebut.”

Perbedaan keketatan dan kedisiplinan dalam pendidikan keluarga dipengaruhi oleh norma yang berlaku di lingkungannya, serta pandangan hidup keluarganya. Keluarga yang menganut paham nativisme akan membiarkan anaknya berkembang sesuai dengan irama, sedangkan keluarga yang sangat ketat akan mengawasi setiap fase perkembangan

anak, dan tidak segan akan memberikan hukuman bila anak melakukan tindakan yang dianggap menyimpang.

e. Wajib Belajar 9 Tahun

UU No. 2 Tahun 1989 dalam Mundzir 2013 menjelaskan bahwa “Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah”. Pendidikan dasar yang dimaksudkan adalah pendidikan selama 9 tahun yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SD selama 6 tahun dan 3 tahun di SMP, atau yang sederajat. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang diberikan untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, pembangunan watak dan kepribadian, serta penanaman ketrampilan dan pengetahuan dasar. Maka semua warga negara harus mendapatkan pendidikan dasar bagi perkembangan kehidupannya baik pribadi maupun dalam bermasyarakat.

f. Program Pendidikan Nonformal dalam Wajib Belajar 9 Tahun.

Pendidikan nonformal salah satu bentuknya adalah PLS atau Pendidikan Luar Sekolah, yaitu “Pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik yang dilembagakan maupun tidak.”(Sesjen Depdikbud, 1992 dalam Mundzir, 2013). PP No. 73/1991 dalam Mundzir, 2013 membahas tentang tujuan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yakni:

1. Melayani warga belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jam pendidikan sekolah.

Jadi, PLS juga dapat memerankan diri sebagai pengganti, pelengkap, dan penampah pendidikan formal dalam rangka memenuhi wajib belajar 9 tahun.

2.2. Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Menurut Ary H. Gunawan dalam Zainuddin (2010 : 39), perubahan sosial adalah suatu perubahan dari kondisi tertentu dalam masyarakat. Konsep perubahan sosial akan sangat penting digunakan untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai aksi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Dalam membahas mengenai perubahan sosial, pertama kita akan membedakan atas perubahan yang dilakukan secara terencana dan perubahan yang tidak direncanakan. Bila yang terjadi merupakan tipe perubahan yang pertama, maka dalam sistematika berpikir pembangunan dapat dikelompokkan sebagai bagian pembangunan, akan tetapi perubahan

hanya merupakan suatu peristiwa bila faktor penyebab di luar faktor kesenjangan dan tidak adanya perencanaan seperti perubahan sosial yang terjadi karena faktor alam. Secara umum yang dimaksud dengan perubahan sosial yaitu terjadinya perubahan pada perangkat atau fungsi dari perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat. (Wahyudin, 2006 : 7.22)

Perubahan sosial adalah peristiwa yang terjadi secara terus menerus sepanjang terjadi penerimaan dan tanggapan pada rangsangan baru. Perubahan sosial sesungguhnya akan tetap terjadi kendati tidak terdapat perubahan yang disadari oleh kelompok peubah yang ditujukan untuk sasaran tertentu. Perubahan yang disebabkan oleh terjadinya penyakit, kegagalan panen, adanya penemuan baru, perubahan politik kadang mengiring pada perubahan sosial melebihi dari perubahan yang direncanakan.

Konsep yang paling dekat dengan perubahan sosial yaitu permasalahan sosial, perubahan sosial dan aksi sosial. Permasalahan sosial adalah suatu kondisi atau gabungan kondisi dalam masyarakat yang dipandang membahayakan oleh anggota masyarakat dan dilakukan upaya baik melalui pemikiran maupun dengan tindakan yang bertujuan untuk menguranginya melalui aksi secara bersama. Perubahan sosial, seperti kita kenal adalah upaya merubah pada perangkat atau fungsi dari perorangan, kelompok dan lembaga dalam masyarakat. Aksi sosial adalah usaha bersama yang dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan sosial.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial

Berikut adalah faktor perubahan sosial yang disebutkan oleh Pramudya (2014) yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor External

1. Adanya kontak dengan kebudayaan masyarakat lain

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah misalnya diffusion. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari seseorang kepada orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat misalnya, dapat diteruskan dan disebarluaskan pada masyarakat lain, sampai masyarakat tersebut dapat menikmati kegunaan dari hasil-hasil peradaban bagi kemajuan manusia. Maka proses semacam itu merupakan pendorong bagi pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan-kebudayaan umat manusia.

2. Bencana alam

Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh Bencana alam. Perubahan lingkungan ini menuntut pola adaptasi yang berbeda dari sebelum terjadinya bencana. Perubahan ke arah kemunduran (regress) ini seringkali menimbulkan goncangan-goncangan dalam kehidupan masyarakat. Orang menjadi lupa terhadap norma dan adat istiadat yang berlaku, pokoknya mereka dapat mempertahankan diri dari bencana tersebut, seperti gunung meletus, banjir, gempa dan sebagainya.

Sebagai contoh Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Mereka harus menata kembali sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Perubahan yang terjadi di Aceh merupakan contoh perubahan sosial – budaya yang kompleks dan membutuhkan waktu lama untuk kembali menjadi stabil.

3. Peperangan

Peperangan tidak hanya akan meningkatkan angka kematian, tetapi juga akan menyebabkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana kebutuhan hidup, seperti lahan pertanian, sekolah, rumah, dan sebagainya. Kekacauan politik akan diikuti dengan kekacauan sosial, ekonomi, dan mental penduduknya. Peperangan ini seringkali diikuti dengan penaklukan atau penjajahan oleh bangsa lain yang menang. Masuknya ideologi baru dan tata cara lainnya dari negara penjajah. Semua itu secara langsung atau pun tidak akan merubah kehidupan masyarakat dan kebudayaannya.

Faktor Internal

1. Adanya sikap terbuka terhadap karya serta keinginan orang lain untuk maju

Sikap menghargai karya orang lain dan keinginan-keinginan untuk maju merupakan salah satu pendorong bagi jalannya perubahan-perubahan. Apabila sikap tersebut telah melembaga, maka masyarakat akan memberikan pendorong bagi usaha-usaha untuk mengadakan penemuan-penemuan baru. Pemberian hadiah nobel dan yang

sejenisnya misalnya, merupakan pendorong bagi individu-individu maupun kelompok-kelompok lainnya untuk menciptakan karya-karya yang baru lagi.

2. Adanya Sistem pendidikan formal yang maju

Sistem pendidikan yang baik dan didukung dengan kurikulum adaptif ataupun fleksibel misalnya, dapat mendorong terciptanya perubahan-perubahan sosial budaya. Pendidikan formal seperti di sekolah mengajarkan kepada anak didik berbagai macam pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh para siswa. Di samping itu, pendidikan juga memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Jika dikelola secara baik dan maju, pendidikan bukan hanya sekedar dapat mengajarkan pengetahuan, kemampuan ilmiah, skill, serta nilai-nilai tertentu yang dibutuhkan siswa, bahkan lebih dari itu juga mendidik anak agar dapat berpikir secara obyektif.

Dengan demikian, pendidikan formal dapat membekali siswa kemampuan dalam menilai suatu kebudayaan masyarakat apakah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kelak. Inilah faktor pendorong perubahan sosial dalam bidang pendidikan formal yang maju.

3. Sikap berorientasi ke masa depan

Adanya prinsip bahwa setiap manusia harus berorientasi ke masa depan, menjadikan manusia tersebut selalu berjiwa (bersikap)

optimistis. Perasaan dan sikap optimistis, adalah sikap dan perasaan yang selalu percaya akan diperolehnya hasil yang lebih baik, atau mengharapkan adanya hari esok yang lebih baik dari hari sekarang. Bila masyarakat sudah tertanam jiwa dan sikap optimistis, akan menimbulkan masyarakat yang selalu bersikap ingin maju, berhasil, lebih baik, dan lain-lain. Adanya jiwa dan sikap optimistik, serta keinginan yang kuat untuk maju itupula sehingga proses-proses perubahan yang sedang terjadi dalam masyarakat itu dapat tetap berlangsung.

4. Sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka (open stratification)

Sistem stratifikasi sosial yang terbuka memungkinkan adanya gerak vertikal yang luas yang berarti memberi kesempatan bagi individu-individu untuk maju berdasar kemampuannya. Dalam keadaan demikian, seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status yang lebih tinggi. Dengan demikian, seseorang merasa dirinya berkedudukan sama dengan orang atau golongan lain yang dianggapnya lebih tinggi dengan harapan agar mereka diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi di dalam hubungan superordinat-subordinat. Pada golongan yang lebih rendah kedudukannya, sering terdapat perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial yang dimilikinya. Keadaan tersebut dalam sosiologi dinamakan “status-anxiety”, yang menyebabkan seseorang berusaha agar dapat meningkatkan kedudukannya.

5. Adanya komposisi penduduk yang heterogen

Pada beberapa kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti etnik, kebudayaan, bahasa, status sosial, ideologi dan lain-lain, yang dikenal dengan “masyarakat heterogen”, lebih mudah menimbulkan pertentangan karena memiliki modal perbedaan. Hal semacam ini juga merupakan salah satu pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat.

6. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya

Allah telah menentukan nasib manusia, rezeki, jodoh dan kematiannya. Akan tetapi dalam rangka memperbaiki taraf kehidupannya, manusia wajib dan menjadi tugas pokok untuk selalu berikhtiar dan berusaha.

Menurut ajaran agama Islam, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu umat (termasuk individu) selama umat (individu) tersebut tidak berusaha untuk mengubahnya. Dengan demikian tugas manusia adalah berusaha, lalu berdoa, sedangkan hasil akhir adalah Tuhan yang menentukannya. Adanya nilai-nilai hidup serta keyakinan yang semacam itu menyebabkan kehidupan manusia menjadi dinamik, dan adanya dinamisasi kehidupan inilah sehingga perubahan-perubahan sosial budaya dapat berlangsung.

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu

Pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, adanya pelaksanaan pembangunan yang hanya menguntungkan sebagian

golongan dan lain sebagainya, merupakan beberapa contoh timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Menyebabkan melebarnya jarak pemisah antara si kaya dan si miskin dan lain-lain, memicu adanya kekecewaan dalam masyarakat. Bila dibiarkan hingga berlarut-larut, hal semacam itu dapat mengakibatkan terjadinya protes-protes yang semakin meluas, atau bahkan kerusuhan-kerusuhan, dan revolusi. Dengan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menjadi faktor pendorong perubahan-perubahan sosial budaya.

Dalam menelusuri faktor yang menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, Mac Iver dalam Wahyudin (2006 : 7.25) mengelompokkannya atas faktor biologis, teknologi dan faktor budaya.

Faktor biologis yang demikian kuat pada perubahan yaitu faktor demografi yang disebabkan oleh perkawinan, kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan karena faktor demografis akan mengiringi pada perubahan sosial, seperti terjadinya pola pekerjaan, pola makan, pola pendidikan serta berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Demikian halnya yang terjadi pada teknologi. Revolusi Industri yang terjadi di Eropa memberikan dampak yang sangat luas pada pola produksi berbagai komoditi pada seluruh permukaan bumi. Ditemukannya mesin uap yang berubah menjadi alat dalam keperluan sehari-hari, sehingga terjadinya pergerakan penduduk dari pedesaan yang tergeser oleh penggunaan traktor untuk mengolah tanah menjadi buruh di pabrik atau menjual jasa di luar pekerjaan pertanian.

Budaya dikenal pula sebagai penentu perubahan sosial.

Koentjaraningrat dalam Wahyudin (2006 : 7.25) mengelompokkan budaya atas :

1. Lembaga domestik misalnya perkawinan dan pengasuhan anak
2. Lembaga ekonomi misalnya industri
3. Pendidikan misal mendidikan anak dan pendidikan tinggi
4. Ilmu pengetahuan misal metode ilmiah dan penelitian
5. Kesenian
6. Keagamaan misal kenduri, pantangan, dan primbon
7. Politik misal partai, dan demokrasi
8. Somatic misalkan kecantikan dan kesehatan

Tiap kelompok budaya demikian kuat pengaruhnya pada perubahan sosial.

Terjadinya pola perkawinan etnik mendorong pada perubahan yang mendasar pada keyakinan, agama, etos kerja, dan pendidikan yang semuanya menjadi dasar bagi perubahan sosial.

Berbeda dengan pemikiran Mc Iver, para sosiolog kontemporer melihat bahwa faktor penentu perubahan sosial tidak merupakan faktor tunggal akan tetapi lebih bersifat ganda dan bersifat rumit. Faktor-faktor yang berinteraksi satu dengan lainnya yaitu :

1. Faktor Geografis

Faktor geografis akan memberikan pengaruh pada penduduk untuk menciptakan situasi baik yang dirasakan mendukung atau menghambat pada perubahan. Contoh yang paling menonjol yaitu adanya badai, gempa bumi akan menggiring pada manusia untuk

melakukan perubahan pada pola kehidupan. Dalam hubungan dengan ini keberadaan sumber-sumber di lingkungan masyarakat akan memberikan pengaruh pada perubahan masyarakat sekitarnya. Seperti contoh ditemukannya bahan tambang seperti di Cilegon, secara langsung memberikan warna pada perubahan masyarakat sekitarnya baik masyarakat penduduk asli maupun orang yang datang untuk mengadu nasib di daerah itu. Pola hubungan antara penduduk asli dengan pendatang akan membentuk pola perubahan sosial yang terjadi di suatu daerah.

2. Faktor Teknologi

Beberapa temuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi seperti terjadinya penemuan baru menggiring masyarakat untuk berubah. Seperti ditemukannya televisi menggiring pada perubahan hubungan dalam keluarga. Televisi menjadi demikian penting dalam sosialisasi dalam masyarakat.

3. Faktor Ideologi

Ideologi akan menjadikan sumber dari keyakinan dan nilai yang sifatnya sangat rumit dan ini terjadi pada semua kelompok masyarakat. Ideologi dalam beberapa hal akan berfungsi sebagai pemelihara keseimbangan dalam suatu masyarakat. Ideologi akan menggiring pula pada perubahan manakala masyarakat tidak merasa sesuai lagi dengan cara-cara untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Faktor Kepemimpinan

Perubahan sosial dalam beberapa hal banyak dirangsang oleh kepemimpinan yang kharismatis yang mampu menghimpun pengikut yang banyak yang akan secara bersama melakukan perubahan sosial.

5. Faktor Kependudukan

Baik yang berhubungan dengan peningkatan maupun penurunan yang drastis akan menggiring pada perubahan sosial. Peningkatan yang demikian berarti akan menggiring pada penemuan teknologi dalam upaya mengimbangi kecepatan pertumbuhan itu misalnya terjadi migrasi keluar karena tekanan di daerah asal. Demikian pula penurunan yang demikian cepat akan mendorong pada pembentukan organisasi sosial terutama dalam mempertahankan diri dari serangan pihak lain atau musuh.

3. Aspek yang Dapat Menjadi Perubahan Sosial

Ada beberapa aspek yang menjadi perubahan sosial di masyarakat, sehingga terjadi dua bentuk perubahan sosial, yaitu nasionalisme dan otonomi daerah. Perubahan sosial yang terjadi karena adanya penyebab yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri maupun yang ada di luar masyarakat. Meskipun yang menjadi penyebab perubahan sosial pada masyarakat tidak datang dari dalam masyarakat itu sendiri namun masyarakatlah yang merasakan dan melaksanakan perubahan. Menurut Wahyudin, Dinn 2009:7.16 arus demokratisasi, globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melanda masyarakat Indonesia telah mengakibatkan perubahan sosial. Berikut adalah uraian tentang nasionalisme dan otonomi daerah.

1. Nasionalisme

Para ahli mengemukakan pendapat mereka tentang nasionalisme, seperti Hans Kohn dalam Wahyudin, Dinn 2009:7.16 yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah kemauan hidup bersama, yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk dan mewajibkan dirinya untuk mengilhami anggota-anggotanya. Sedangkan Joseph Ernest Renan dalam Wahyudin, Dinn 2009:7.16-7.17 mengatakan bahwa pengertian nasionalisme didasarkan atas manusia, bahwa bangsa itu adalah sekelompok manusia yang berkehendak untuk bersatu. Sedangkan paham nasionalisme yang didasarkan pada perpaduan politik-sosial-ekonomi-budaya dikemukakan oleh Hans Kohn adalah paham yang menekankan pada kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Louis Snyder dalam Wahyudin, Dinn 2009:7.17 juga menyumbangkan pendapat tentang nasionalisme, bahwa nasionalisme adalah hasil dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual pada suatu tahapan dalam sejarah.

Redja Mudyahardjo 2012 dalam Wahyudin, Dinn 2009:7.17 mengemukakan ciri-ciri nasionalisme Indonesia, yaitu:

- a. Nasionalisme kerakyatan/persatuan yang anti penjajahan. Pernyataan kemerdekaan yang dirumuskan oleh bangsa Indonesia adalah pernyataan kemerdekaan bangsa dan bukan pernyataan kemerdekaan perorangan.
 - b. Nasionalisme kerakyatan/persatuan yang patriotik dan religious.
- Nasionalisme Indonesia lahir dari perjuangan gerakan kemerdekaan

Indonesia dan bersumber dari rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan keinginan luhur untuk membentuk kehidupan kebangsaan yang bebas.

- c. Nasionalisme kerakyatan/persatuan yang berdasar Pancasila. Nasionalisme Indonesia adalah rasa nasionalisme yang bersendikan kedaulatan rakyat yang berdasar Pancasila, dimana dalam pelaksanaannya bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan sosial.

Rasa nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berarti rasa bangga yang ada pada diri bangsa Indonesia dan menjelma ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud rasa syukur telah menjadi bagian dari Indonesia. “Kebanggaan sebagai suatu bangsa meruakan suatu kebanggaan moral dan etis. Inilah tantangan yang pertama dan utama di dalam, pendidikan nasional, membangun masyarakat madani Indonesia. Rasa bangga menjadi orang Indonesia berarti pula bangga dengan kebudayaan Indonesia”. (H.A.R Tilaar, 2002 dalam Wahyudin, Dinn 2009:7.21).

Selain mencerdaskan siswa, tugas guru adalah menanamkan rasa nasionalisme dan bangga menjadi Indonesia kepada siswa, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus yang peduli dan cinta terhadap tanah airnya.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya tanpa

ada campur tangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan pada UUD 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, yang kemudian diperkuat oleh ayat (6) dan (7) yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang”. Wahyudin, (2009:7.23)

menyebutkan tujuan otonomi daerah, antara lain, Tujuan penyerahan beberapa urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antara lain agar penyelenggaraan pemerintah dapat dilaksanakan lebih demokratis, layanan pemerintah terhadap masyarakat dapat dilakukan secara cepat, mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan, sekaligus memberikan perhatian dan peluang bagi pembangunan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sedangkan menurut Sidi, 2000 dalam Wahyudin, 2009:7.23, “Otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya local serta menggali potensi dan keanekaragaman daerah, bukan untuk memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten atau kota”.

Salah satu sasaran otonomi daerah adalah bidang pendidikan. Berhasil atau tidaknya pendidikan di daerah tergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti potensi sumber daya manusia maupun

kendala-kendala pendidikan. Hal ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pendidikan pada daerah yang dipimpinnya, selain itu pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas fasilitas dan akses pendidikan pada daerah ke pemerintahannya.

“Undang-Undang Otonomi Daerah meletakkan kewenangan seluruh urusan pemerintah bidang pendidikan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai pada pengendalian”. (Wahyudin, 2009:7.24).

Pemerintah pusat hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, dan evaluasi. Dengan adanya otonomi dalam bidang pendidikan, diharapkan layanan pendidikan akan lebih baik karena pemerintah daerah mengetahui karakter daerah yang dipimpinnya. Menurut Mulyani dalam Wahyudin 2009, ada enam permasalahan dalam mengimplementasikan UUPD tahun 1999 dalam bidang pendidikan, yaitu kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, perluasan dan pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Djazuli, 2000 dalam Wahyudin, 2009 mengatakan ada beberapa langkah yang dirumuskan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang akan datang maupun yang telah terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di otonomi, yakni:

1. Menyusun visi, misi, strategi, dan fungsi sehingga bisa menunjuk arah yang jelas menjadi suatu sinergi kekuatan guna mencapai sasaran yang telah disepakati bersama, selanjutnya dapat disusun alokasi pembiayaan secara proporsional yang mengikuti fungsi, diikuti dengan

pengendalian yang konsisten untuk menghindari berbagai penyimpangan

2. Menginventarisasi kewenangan yang dapat diselenggarakan oleh kanwil sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah selanjutnya menata kembali organisasi pendidikan walaupun menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain penghapusan unit dan atau jabatan yang tidak diperlukan serta pengurangan pegawai.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat mengurus sebagian besar kepentingannya sendiri.

2.3. Hubungan Pendidikan dan Perubahan Sosial

Pendidikan merupakan agen perubahan sosial yang juga menentukan arah tujuan perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri selain dapat ditentukan dan direncanakan arah tujuan perubahannya, dapat juga berubah secara spontan karena adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Perubahan sosial ini dapat juga disebut sebagai perkembangan masyarakat, dimana masyarakat selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

1. Pendidikan dalam Perspektif Perubahan Sosial

Pendidikan yang berperan sebagai agen perubahan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, pendidikan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, begitu juga sebaliknya, arah perkembangan masyarakat dapat direncanakan melalui pendidikan, misalnya pada Kurikulum 2013 yang menekankan pada pendidikan karakter, diharapkan anak-anak dapat ditumbuhkan kembali jiwa

ke-Indonesiaanya yang telah memudar, sehingga pemuda Indonesia tidak kehilangan kepribadianya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting, yakni memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, sehingga pendidikan pun terkena imbas dari otonomi daerah atau dikenal dengan desentralisasi. Beberapa factor penyebab terjadinya desentralisasi pendidikan menurut NCREL dalam Mundzir 2013:55, yakni:

1. Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan penilaian pendidikan.
2. Adanya anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa.
3. Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
4. Penampilan fisik sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
5. Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan pendanaan dan privatisasi.

Sedangkan Sutopo dalam Mundzir, 2013:55 menambahkan beberapa factor, diantaranya:

1. Terjadinya tuntutan reformasi di segala bidang termasuk bidang pendidikan

2. Kurangnya persaingan antar daerah dalam memajukan pendidikan karena tuntutan nasional yang seragam.
3. Tuntutan masyarakat untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan dan memajukan bidang pendidikan.
4. Ketidak sesuaian tuntutan nasional dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
5. Adanya ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat atas pendanaan, kurikulum, fasilitas, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Kurangnya kreatifitas daerah, sekolah, personil penyelenggara dan pelaksana pendidikan, adanya rasa takut terhadap atasan dalam hal pelaksanaan peraturan secara nasional.
7. Kurangnya kemandirian lembaga pengelola dan pelaksana pendidikan karena besarnya ketergantungan terhadap pemerintah.

Karena banyaknya tuntutan desentralisasi, maka semua daerah merasa bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan di daerahnya masing-masing, sehingga daerah-daerah mengembangkan potensinya masing-masing untuk dapat dijadikan bahan pendidikan, seperti muatan lokal yang di tiap daerah berbeda, misalnya muatan lokal Bahasa Jawa hanya ada di daerah Jawa. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan potensi kedaerahan dan menuntut keaktifan siswa sebagai pembelajar. Untuk menyertai perubahan kurikulum tersebut, pemerintah mengeluarkan surat keputusan, seperti SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan SK Mendiknas No. 045/U/2002 KBK untuk perguruan tinggi sampai SK KBK untuk sekolah menengah dan dasar.

Peraturan lain terkait perubahan pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat Tahun 2003 pasal 55; ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat berhak melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal maupun nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat; ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaanya sesuai dengan standar nasional pendidikan; ayat (3) menyebutkan bahwa dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

2. Pendidikan dalam Menunjang Pembangunan dan Perubahan Sosial

Kita menyadari benar bahwa perubahan sosial karena faktor intern dan ekstern adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari keberadaannya. Dinyatakan oleh Dr. Soedjatmoko dalam Wahyudin (2006 :7.48) bahwa perubahan sosial yang demikian rumit adalah gambaran dari kehidupan masa depan. Maka yang menjadi tuntutan khususnya bagi negara yang sedang berkembang adalah memberikan arah agar bisa mengurangi dampak negatif dan memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan masa depan. Dalam hubungan ini pendidikan yang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari para profesional sudah waktunya memberikan tanggapan yang lebih positif pada perubahan.

Untuk menunjukkan peran yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan dalam mengarahkan perubahan sosial diperlukan upaya nyata mengembalikan lembaga pendidikan sebagai lembaga unggulan. Lembaga yang unggul ditandai dengan program intern maupun ekstern yang jelas yang mampu mengembangkan kedua potensi itu. Dengan menyandarkan pada kemampuan guru sebagai pengendali utama proses pendidikan, selanjutnya proses pendidikan diarahkan pada keterampilan untuk pembangunan kecakapan peserta didik. Peningkatan guru untuk mengembangkan kurikulum yang mampu mengembangkan kecakapan peserta didik adalah suatu keharusan. Manajemen pendidikan yang menunjang pada pendidikan yang unggul hendaknya menyertakan sebanyak mungkin orang tua dan pihak pengguna jasa pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pada pengembangan kemampuan peserta didik.

Dalam hubungan ini Fien dalam Wahyudin (2006 : 7.49) memberikan sejumlah petunjuk praktis dalam meningkatkan keunggulan lembaga pendidikan, dengan mengembalikan fungsi pendidikan sebagai pemelihara nilai pada pengembang nilai baru, meliputi bidang pengembangan peran sosial pendidikan, pengembangan tujuan pendidikan, pengembangan kurikulum, peran pendidik, peran peserta belajar, proses pengawasan dan penilaian.

Peran sosial pendidikan harus diarahkan pada kemampuan untuk saling merefleksikan diri antara kepentingan sekolah dan masyarakatnya. Sekolah hendaknya memberikan sumbangan dalam memecahkan ketidakadilan sosial dan mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi

nyata dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Sebaliknya lingkungan sosial harus memberikan sumbangan nyata pada proses pendidikan dengan tujuan utama yaitu untuk mengembangkan generasi yang lebih untuk mengisi peran sosial. Berbeda dengan pendidikan klasik yang menekankan pada kemampuan peserta didik untuk berpartisipasi dalam masyarakat ditunjang fungsi utama sekolah untuk memelihara dan melakukan legitimasi dan melakukan pemisahan, pemilahan struktur sosial-politik dan ekonomi serta ukuran keberhasilan yaitu dalam upaya mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi persyaratan kerja.

Keluaran pendidikan hendaknya ditunjukkan dalam upaya memanfaatkan semua sumber daya secara efisien serta melakukan partisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam hubungan dengan aktualisasi diri harus dilihat dalam hubungannya dengan konteks sosial, dengan mengekspresikan makna transformasi sebagai sarana untuk melakukan transformasi sosial akan tetapi bukan semata-mata pendidikan untuk mengembangkan individualisme. Pada pendidikan klasik keluaran pendidikan dibatasi pada kemampuan untuk mengisi salah satu peran atau pekerjaan dalam masyarakat melalui penguasaan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan.

Kurikulum yang unggul merupakan penunjang dari pelaksanaan pendidikan yang unggul. Kurikulum demikian harus memiliki fleksibilitas dengan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, lembaga pendidikan dan peserta didik. Pada pendidikan klasik kurikulum terdiri dari subjek yang kaku yang menekankan pada bentuk serta pengaturan waktu yang diarahkan untuk pemilahan peserta didik yang didasarkan pada kriteria dalam penampilan.

Kurikulum yang fleksibel menuntut pengorganisasian kelas yang fleksibel pula. Pengorganisasian yang demikian harus memiliki toleransi pada keagamaan pengaturan kecakapan yang terpadu, serta batas antara sekolah dengan masyarakat paling tidak secara sosial harus dikurangi bila tidak dihilangkan sama sekali. Berbeda dengan pendidikan klasik pengaturan kelas dilakukan secara homogen dalam pengelompokan, pengarahan dan penyeleksian. Pengaturan kelas secara formal dengan metode pembelajaran didominasi informasi satu arah sebagai prasyarat untuk memperoleh keterampilan manual.

Peran guru harus diubah dari peluncur pengetahuan pada pengembang proyek dan manusia sumber, yang mampu menggunakan semua sumber secara efisien serta mampu menjalin kerja sama dengan negosiasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Demikian pula peran peserta belajar harus diubah dari penerima nilai-nilai menjadi *colearner*, menggunakan pengetahuan melalui interaksi dengan pihak lain secara efisien dalam suasana kolaboratif untuk memecahkan permasalahan sosial. Perbedaannya dengan pendidikan klasik yaitu sebagai seorang yang memiliki otoritas tinggi dalam melakukan peluncuran pengetahuan, di mana struktur dan penahanan pengetahuan telah diketahui dengan pasti dalam upaya menguasai materi pengetahuan secara penuh. Sedangkan peran peserta belajar bukan sebagai *colearner* akan tetapi terbatas sebagai penerima pengetahuan melalui pemberian motivasi agar mencapai suatu pola yang harus dipikirkan bukan diarahkan untuk dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pengembangan lembaga unggul ini diperlukan sistem pengawasan bersama, memadukan antara potensi partisipasi dengan perwakilan yang demokratis untuk memberikan pengawasan, yang tujuan akhirnya bukan untuk memperoleh status akan tetapi dalam upaya mengembangkan partisipasi dalam pengawasan dan peningkatan produktivitas. Perbedaannya dengan pendidikan klasik di mana guru dan peserta didik demikian kuat dibatasi oleh hirarki yang didasari oleh keyakinan bahwa siapa yang memiliki status maka dia yang akan memiliki kekuasaan.

Bagian akhir dari proses pendidikan unggul menuntut penilaian yang terpadu dengan menggunakan negosiasi antara penilaian formal guru dengan peserta belajar sebagai *colearner* dengan tujuan memenuhi persyaratan sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja atau sosial. Tujuan akhir dari penilaian yaitu dalam upaya meningkatkan kemampuan kerja sama dalam memecahkan permasalahan sosial. Penilaian untuk pendidikan klasik mengandalkan pada tes sebagai prasyarat untuk mengetahui sesuatu serta memperoleh predikat master dalam pekerjaan dan pengetahuan.

Sejumlah prasyarat lagi harus dikembangkan dalam pendidikan yang unggul terutama dalam mengembangkan etika pemanfaatan sumber-sumber secara efisien dan produktif, meliputi pengembangan ranah pendidikan, pengembangan kemampuan memecahkan permasalahan, pengembangan etika dan kemelekakan politis.

Wahyudin (2006 : 7.51) menjelaskan bahwa bila pada pendidikan klasik, ranah yang dikembangkan dibatasi pada tiga ranah terpisah antara

pengetahuan, sikap dan keterampilan, sedangkan pada pendidikan unggul hal ini dikembangkan menjadi lima bagian :

1. Ranah kesadaran yang oleh Paulo Frerie dikenal dengan kesadaran diri memberikan penekanan pada kelompok dan perorangan sebagai sumber daya manusia yang harus memiliki kesadaran dan memiliki sensitivitas pada lingkungan dan memecahkan permasalahannya.
2. Pengetahuan ditujukan pada upaya untuk membantu kelompok maupun perorangan untuk memperoleh pemahaman dasar yang terdapat pada lingkungan serta kerangka permasalahan sosial.
3. Sikap yaitu membantu kelompok dan perorangan untuk memperoleh seperangkat nilai dan perasaan yang berhubungan dengan permasalahan sosial serta memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk secara aktif memecahkannya.
4. Keterampilan yaitu membantu kelompok dan perorangan untuk memperoleh keterampilan untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan sosial.
5. Mempersiapkan individu dan perorangan untuk mengambil peluang dan bekerja secara aktif dalam memecahkan permasalahan sosial.

Perbedaan yang utama dengan pendidikan klasik yaitu pada cara pandang dimana ranah satu dengan lainnya seolah terpisah serta penekanan penilaian lebih apda pengetahuan, sedangkan pada tipe pendidikan unggul lebih diarahkan pada kautuhan ranahm baik yang menyangkut kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan dan terutama lagi pada perwujudannya

dalam kemampuan mengambil tindakan. Di sini perbedaan yang nyata antara pendidikan yang bersifat retorika dengan pendekatan perilaku.

Untuk menunjang pendidikan dengan pendekatan pada pengambilan tindakan ini diperlukan prasyarat kemampuan pemecahan masalah.

Pemahaman praktis tentang kemampuan pemecahan masalah sangat dibutuhkan seperti kemampuan untuk melakukan observasi, pendefinisian, analisis dan penjelasan, pembuatan keputusan, evaluasi serta *judgement* serta respons pada pemecahan permasalahan. Hal ini masih harus dilengkapi dengan kemampuan pemahaman kecenderungan ideologi, termasuk pemahaman proses sosial, identifikasi kekuasaan dan sumber-sumbernya serta hambatan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan.

Etika yang harus dikembangkan selain dari keberanian dituntut pula untuk memahami sistem yang memiliki interdependensi, pemahaman tentang kedudukan tiap subsistem serta persamaan, hak dan etika melakukan perubahan sosial melalui pendidikan membutuhkan kemelekakan politis meliputi pemahaman yang diikuti dengan penguasaan sumber-sumber, termasuk kekuasaan, distribusi, lembaga sosial dan budaya. Kemampuan memahami nilai yang berkaitan dengan justifikasi dari pihak lain dalam membuat keputusan, menghargai bukti, keterbukaan dan menghargai perbedaan di samping kemampuan mengevaluasi alternatif, perencanaan dan pengevaluasian tindakan.

Lembaga pendidikan yang menekankan pada keunggulan berarti mampu meningkatkan fungsinya dalam berpartisipasi memecahkan permasalahan sosial dengan mengembangkan *interest* dan minat peserta

didik. Untuk membina kegiatan ini diperlukan kemampuan guru dalam melakukan koordinasi dalam upaya menjamin kemampuan untuk menunjukkan kemampuan peserta didik. Peserta didik sejak awal harus terbina untuk melakukan negosiasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan termasuk menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi setiap permasalahan.

Bila pada teori klasik pengetahuan bersifat baku serta pemecahan masalah sepenuhnya menggunakan teori yang sudah ada. Pada pendidikan yang bercorak keunggulan pengetahuan harus dilihat sebagai suatu kontinum yang memiliki arti dalam kefungisian dalam memecahkan permasalahan sosial yang demikian bukan semata-mata bersifat baku, akan tetapi harus senantiasa diperbarui dan memperbarui diri dilihat dari peserta didik untuk memungkinkan penyesuaian yang paling memadai pada pilihan yang ada.

Untuk menjamin keberartian setiap konsep yang dipelajari maka batas-batas psikologi antara lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat sebagai wahana terjadinya perubahan sosial harus dikurangi dan bila mungkin dihilangkan. Lembaga pendidikan dan masyarakat adalah dua pranata yang harus tetap solid, karena tiap yang satu senantiasa membutuhkan yang lainnya.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pendidikan merupakan suatu cara untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang ditujukan oleh individu untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Analisis terhadap sistem pendidikan dapat dilakukan dari *in put*, proses, *out put*, dan *out come* dimana keseluruhannya saling memengaruhi dan menentukan perubahan sosial yang akan terjadi.

Konsep perubahan sosial akan sangat penting digunakan untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai aksi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah peristiwa yang terjadi secara terus menerus sepanjang terjadi penerimaan dan tanggapan pada rangsangan baru. Perubahan sosial sesungguhnya akan tetap terjadi kendati tidak terdapat perubahan yang disadari oleh kelompok pembah yang ditujukan untuk sasaran tertentu.

Pendidikan merupakan agen perubahan sosial yang juga menentukan arah tujuan perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri selain dapat ditentukan dan direncanakan arah tujuan perubahannya, dapat juga berubah secara spontan karena adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Perubahan sosial ini dapat juga disebut

sebagai perkembangan masyarakat, dimana masyarakat selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

3.2. Saran

Melihat perkembangan iptek yang sangat pesat, sebagai sumber daya manusia harus siap menerima perkembangan tersebut, dengan mempertimbangkan segi positif dan segi negatif yang ditimbulkan dari iptek itu sendiri. Baik ilmu pengetahuan maupun teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Dengan begitu, sebaiknya antara ilmu pengetahuan dan teknologi informasi bisa berkembang selaras sehingga dapat membentuk perubahan sosial masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Mudzir. 2013. *Sosiologi Pendidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Pramudya, Andry. 2014. Perubahan Sosial. (online),
(http://googleweblight.com/?lite_url=http://sosialsosiologi.blogspot.com/2014/10/faktor-pendorong-perubahan-sosial.html?m%3D1&ei=1hx18PIO&lc=id-ID&s=1&m=180&ts=1453816930&sig=ALL1Aj45KwJ692m_0eNMKinaGo4535RuNg), diakses 26 Januari 2016.
- Purnamasari, Wulan. 2014. *Pendidikan dan Perubahan Sosial*. (online),
(http://www.academia.edu/6887849/PENDIDIKAN_DAN_PERUBAHAN_SOSIAL), diakses 25 Januari 2016.
- Wahyudin, Dinn. 2006. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wahyudin, Dinn. 2009. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zainuddin, Muhammad. 2010. *Sosio-Antropologi Pendidikan SD*. Malang: PHK S1 PGSD-A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.